

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN

NOMOR KEP-1/PPID/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai acuan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan daftar informasi publik Kementerian Keuangan tahun 2024 melalui Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2024 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2024;
- b. bahwa daftar informasi publik Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pemutakhiran dengan mengacu kepada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan diberikan persetujuan oleh Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan memperhatikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terhadap Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2024 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan daftar informasi publik Kementerian Keuangan tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Nomor KEP-1/PPID/2024 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Salinan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Kepala Lembaga *National Single Window*; dan
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
DENI SURJANTORO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR
KEP-1/PPID/2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI
PUBLIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2025

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
PERIMBANGAN KEUANGAN						
348.	Rincian Alokasi dan Realisasi Transfer ke Daerah, yang terdiri dari: a.Dana Bagi Hasil; b.Dana Alokasi Umum; c. Dana Alokasi Khusus Fisik; d.Dana Alokasi Khusus Non-Fisik; e. Dana Insentif Daerah/ Insentif Fiskal; f. Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan g. Dana Desa. Kode Arsip: 1. IK0.0.2 (Pengalokasian Dana Bagi Hasil [DBH]) 2. IK0.1.2 (Pengalokasian Dana Alokasi Umum [DAU]) 3. IK0.2.2 (Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik) 4. IK0.3.2 (Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Non Fisik) 5. IK0.9.2 (Pengalokasian Insentif Fiskal)	a. Direktorat Dana Transfer Umum (DTU). b. Direktorat Dana Transfer Khusus (DTK). c. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK).	a. Direktur DTU. b. Direktur DTK. c. Direktur DDIOKK.	Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan (IK0.0.2, IK0.1.2, IK0.2.2, IK0.3.2, IK0.5.2, IK0.7.1, IK0.8.2, IK0.9.2) 10 tahun setelah tahun penciptaan arsip, selanjutnya akan dinilai kembali oleh Unit Pengolah Arsip dan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan (IK5.0)

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
	6. IK0.5.2 (Pengalokasian Dana Otonomi Khusus) 7. IK0.7.1 (Pengalokasian Dana Keistimewaan) 8. IK0.8.2 (Pengalokasian Dana Desa) 9. IK5.0 (Laporan Keuangan TKD)					
349.	Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing provinsi. Kode Arsip: IK1.0 (Pengembangan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)	Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	Direktur PDRD.	Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Jakarta.	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
350.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
351.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Fungsi. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
352.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Urusan. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
353.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Jenis Pajak. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
354.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per Jenis Retribusi. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
355.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semester I. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.
356.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahunan. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi
357.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulanan. Kode arsip: IK7.0.0 (Pengumpulan Data Keuangan Daerah)	Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer (SIPT).	Direktur SIPT.	Bulanan, Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, Jakarta.	<i>Softcopy</i>	5 tahun setelah tahun penciptaan arsip.

No.	Nama Informasi	Unit Kerja yang Menyediakan	Penanggung jawab Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
DENI SURJANTORO

